

# **Pelebagaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sleman dalam Konteks Pelaksanaan UU ASN**

**Oleh: Yanuardi, M.Si., Utami Dewi, MPP., Marita Ahdiyana, M.Si.**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pelembagaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelembagaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholder dalam pelembagaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman khususnya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan reformasi birokrasi pasca penerapan UU ASN di Kabupaten Sleman telah berjalan dan terus berlanjut dengan sejumlah agenda perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan telah pelaksanaan proses pembiasaan terhadap aturan dan budaya baru yang ingin dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat suatu perangkat dalam bentuk manajemen perubahan sebagai cara untuk mengawal perubahan dalam mencapai tujuannya. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam proses pelembagaan reformasi birokrasi tersebut. Kendala utama adalah budaya lama birokrasi, yang minta dilayani, menyebabkan tujuan reformasi birokrasi belum tercapai secara optimal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman, seperti pemerintah daerah lain di Indonesia, harus menunggu arahan kebijakan dari pemerintah pusat dikarenakan sering terjadinya perubahan kebijakan di tingkat pusat.

Kata Kunci: *pelebagaan, refomasi birokrasi, UU ASN*